

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Annisa Irhamna Yusri¹, Tartila Devy²

¹ Jurusan Akuntansi Syariah, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, annisairhamna6@gmail.com

² Jurusan Akuntansi Syariah, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, tartilaadv@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Local government financial performance, regional revenue and expenditure budget, analysis of financial performance, financial ratios

Received : 6 Januari 2025

Accepted : 10 Februari 2025

Published : 28 Februari 2025

The implementation of regional autonomy gives authority the regions in managing their own regions. The Bangka Belitung Islands Province is one of the regions resulting from regional expansion after the implementation of regional autonomy. The purpose of this study was to determine the financial performance of local government in the province of The Bangka Belitung Islands in 2018-2022. This research was conducted at the The Bangka Belitung Islands Province BAKUDA which is located on Jl. Belitung Island No. 4 Integrated Office and Settlement Complex. This type of research is descriptive quantitative. The data collection techniques used are documentation, interviews, literature review, and accessing the web and related sites. Local government financial ratios are used as a measuring tool in technical analysis. According to the study's findings, regional financial independence has remained low over the last five years, from 2018-2022, with an average of 51,21%; the average ratio of local revenue effectiveness is 105,09%; the average ratio of regional financial efficiency is 79,37%; the average ratio of spending harmony indicates that routine spending is allocated more than development spending; the average revenue growth is 5,54%; and the average DSCR is above 2,5%. According to the findings of the analysis of the regional government's financial performance, it manages the allocated money quite effectively.

Pendahuluan

Perekonomian merupakan sebuah interaksi yang terjadi di mana saja, baik dalam kelompok masyarakat maupun dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah, dalam pengelolaan sumber pendanaan yang masuk atau keluar. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Aturan ini memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana yang menetapkan alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana publik, yang harus disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun. Salah satu laporan yang disusun dan disampaikan oleh pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara berdampingan, yang menunjukkan sejauh mana target yang direncanakan telah tercapai. Penggunaan anggaran daerah dengan ukuran kuantitas dan kualitas yang terukur dapat dilihat melalui kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintahan daerah merujuk pada sejauh mana hasil kerja keuangan

pemerintah daerah tercapai, meliputi pendapatan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan indikator keuangan yang telah ditentukan oleh kebijakan atau undang-undang dalam satu periode anggaran. Analisis laporan keuangan adalah pengamatan terhadap laporan keuangan untuk menganalisis kondisi dan kinerja keuangan, serta mengevaluasi potensi kinerja keuangan di masa depan. Salah satu alat yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Analisis laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio, seperti rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio cakupan pembayaran utang (*debt service coverage ratios*), rasio likuiditas (*current ratio*) dan rasio solvabilitas (*debt to asset*). Setelah memperoleh rasio-rasio tersebut, dapat disimpulkan apakah kinerja keuangan mengalami peningkatan atau penurunan. Selain itu, dengan dilakukannya analisis keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan di masa mendatang, memeriksa dan mengevaluasi kinerja, menunjukkan cara mencapai target kinerja, serta menemukan dan memecahkan masalah dihasilkan suatu evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya. Berikut tabel anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022:

Tabel 1. Anggaran Dan Realisasi Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran		Realisasi		Persentase	
	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pendapatan (%)	Belanja (%)
2018	2.487.065.640.565	2.126.288.918.926	2.556.977.711.924	1.932.426.946.667	102,81%	90,88%
2019	2.762.433.155.880	2.523.039.763.264	2.694.205.659.655	2.264.022.634.746	97,53%	89,73%
2020	2.555.339.034.450	2.364.642.978.202	2.405.260.307.097	2.203.628.597.880	94,13%	93,19%
2021	2.556.700.637.538	2.461.903.318.556	2.708.948.673.048	2.115.893.278.614	105,95%	85,95%
2022	2.515.387.365.761	2.466.641.095.689	2.881.466.811.892	1.945.979.205.203	114,55%	78,89%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkesinambungan. Selanjutnya, penyerapan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sangat rendah, dimana Bangka Belitung berada di urutan nomor dua dari bawah (urutan 33 dari 34 provinsi) di Indonesia. Sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga kurang optimal.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	PAD (%)	Dana Perimbangan (%)
2018	2.556.977.711.924	850.441.774.831	1.694.218.759.243	33,26%	66,26%
2019	2.694.205.659.655	826.701.095.332	1.742.433.563.849	30,68%	64,67%
2020	2.405.260.307.097	683.432.674.809	1.604.813.796.610	28,41%	66,72%
2021	2.708.948.673.048	895.763.128.991	1.693.883.879.331	33,07%	62,53%
2022	2.881.466.811.892	1.090.477.839.965	1.732.857.804.927	37,84%	60,14%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Tabel 2 memperlihatkan perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa dana perimbangan memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah. Perbedaan yang signifikan antara realisasi Pendapatan Transfer dan PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat melaksanakan kebijakan terkait otonomi daerah secara optimal, terkhusus pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2019, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung memiliki 7 Kabupaten/Kota. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,40% melambat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,05%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,30% melambat bila dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar 3,32%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45% melambat dibanding tahun 2017 yang sebesar 4,47%. Data yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. (babel.bps.go.id)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 terkait kinerja keuangannya dengan judul "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022*".

Kajian Pustaka

Stewardship Theory

Menurut Davis et al, *Stewardship theory* mendefinisikan situasi yang menggambarkan dimana sasaran hasil utama para manajemen termotivasi untuk kepentingan organisasi, bukan tujuan-tujuan individu. *Stewardship theory* menjelaskan perilaku individu dalam hal hubungan *principal* dan *steward*, dimana *steward* dikendalikan oleh tingkat identifikasi dan komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dan termotivasi oleh faktor instrinsik, seperti pekerjaan itu sendiri, yang mengarah pada memprioritaskan tujuan kolektif diatas tujuan individu. *Stewardship theory* berfokus pada pengembangan rasa saling percaya dan kerja sama antara *principal* dan *steward*. *Stewardship theory* menyatakan bahwa hubungan saling percaya dan kerja sama antara *principal* dan *steward* berkorelasi positif dengan kinerja pemerintahan. (Andrew Keay, 2015)

Dalam penelitian ini, teori *stewardship* dapat menjelaskan peran pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik, dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat serta membuat pertanggungjawaban yang sesuai. Hal ini karena kontrak hubungan antara *principal* dan *steward* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Steward* (manajemen dan auditor internal) berusaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan meningkatkan pengendalian intern untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang baik. (Ralf Muller, 2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang mencakup seluruh pendapatan dan belanja daerah untuk pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran yang bersangkutan. Semua penerimaan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD, sedangkan semua pengeluaran dan kewajiban yang membebani daerah pada tahun anggaran tertentu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (M. Yamin, 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah wajib dicatat dan dikelola sebagai bagian dari pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Namun, penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pencapaian hasil kerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dikenal sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil kerja ini mencakup uang yang diterima dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah, yang diukur menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau undang-undang selama periode anggaran. Ada penilaian menyeluruh, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja keuangan daerah. Administrasi dan penyediaan jasa pemerintah daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien akan menghasilkan kinerja yang baik bagi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah bertujuan sebagai berikut (Ni Ketut Sari Adnyani, 2018):

1. Untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan aktivitas dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Untuk mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap pembentukan pendapatan daerah.
5. Untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama periode waktu tertentu.

Analisa Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan dapat membantu memahami masalah dan peluang dalam laporan keuangan. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, standar pengakuntansian untuk APBD berbeda dengan standar pengakuntansian untuk laporan keuangan perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi, sehingga dapat mengukur kinerja keuangan. Beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar sumber daya tersebut dapat menjadi sumber utama keuangan daerah yang mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana luar dan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat yang lebih tinggi dari rasio ini menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih tergantung pada bantuan luar atau belum mandiri. Tingkat yang lebih rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri. Tingkat yang lebih rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri. (Ana Sopanah dkk, 2020)

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerinta Pusat—Daerah}} \times 100\%$$

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat jenis pola hubungan hubungan situasional antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yaitu:

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Yoyo Sudaryo, 2017

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah melaksanakan kegiatan atau prestasi yang direncanakan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan dalam bentuk persen. Dengan kata lain, rasio efektivitas menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah melaksanakan uang yang dianggarkan. (Kamilau Konstante, 2023)

Rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}}{\text{Target Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah semakin baik. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana dikutip dalam Melisa Anastasia (2012:82) tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase	Kriteria
100% keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang	Tidak efektif

Sumber: Kamilaus Konstante, 2023

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) adalah perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan total pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan kurang penting apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima. (Halkadri Fitra, 2022)

Rumus efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang	Sangat Efisien

Sumber: Halkadri Fitra, 2022

4. Rasio Kesenjangan

Prinsip keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana antara belanja operasi dan belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi, semakin kecil persentase yang tersedia untuk belanja modal, yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio keserasian terdiri dari dua perhitungan: rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi memberikan informasi tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk keperluan operasi dalam laporan kepada pembaca laporan. Belanja operasi biasanya merupakan sebagian besar dari total belanja daerah, berkisar antara 60% dan 90%, dan biasanya merupakan belanja yang manfaatnya habis digunakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, belanja ini bersifat jangka pendek dan terkadang rutin dan berulang. Perhitungan rasio belanja operasi sebagai berikut (Wa Ariadi, 2021):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal memberikan informasi tentang bagian belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya jangka menengah dan panjang, sehingga sifatnya jangka Panjang dan rutin. Ketika belanja modal dibandingkan dengan belanja daerah, perbandingan antara belanja modal dan belanja daerah biasanya berkisar antara 5% dan 20%. Perhitungan rasio Belanja Modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah ukuran penting untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola pengeluaran seiring dengan waktu. Dengan menganalisis pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, pemerintah daerah dapat mengevaluasi area-area yang memerlukan perhatian khusus. Perhitungan rasio pertumbuhan sebagai berikut (M. Ichlasul Amal dan Puji Wibowo, 2022):

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

R : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah pada tahun Ke- n.

P_0 : Total Pendapatan Daerah sebelum tahun ke - 0.

6. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban utangnya serta kemampuannya untuk mengajukan pinjaman baru. DSCR menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban utangnya yang jatuh tempo serta menilai kemampuannya dalam mengajukan pinjaman baru untuk pembiayaan Pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah, tetapi juga dapat menggunakan sumber dana alternatif melalui pinjaman, sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan yang berlaku. DSCR minimal adalah 2,5. (Freddy Samuel Kawatu, 2019).

Rumus untuk menghitung Rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Utang + Bunga + Biaya Pinjaman)} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

7. Rasio Likuiditas (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau mendanai hutangnya. Salah satu analisis likuiditas adalah rasio lancar, yang merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan sebuah organisasi. Rasio lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya. (Dailibas dkk, 2010)

Perhitungan rasio lancar sebagai berikut:

$$Rasio Likuiditas (Current Ratio) = \frac{Aktiva Lancar}{Utang Lancar} \times 100\%$$

8. Rasio Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi semua kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jika tingkat rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengandalkan pendanaan melalui utang yang signifikan, yang berarti lebih sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan pinjaman tambahan di masa depan. Sebaliknya, jika tingkat rasionya rendah, maka jumlah utang yang dapat dibayar pemerintah akan lebih kecil. Salah satu analisis rasio solvabilitas adalah *debt to asset ratio*. Perhitungan *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut:

$$Rasio Solvabilitas (Debt to Asset Ratio) = \frac{Total Utang}{Total Aset} \times 100\%$$

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengelolaan anggaran belanja pada pemerintah Kota Bangka Belitung berdasarkan data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Bangka Belitung.

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kantor BAKUDA (Badan Keuangan Daerah) Jl. Pulau Belitung N0.04, Air Itam, Kec. Bukik Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendapatkan informasi tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penelitian ini dilakukan dari April sampai Juni 2024 dengan tahun pengamatan 2018-2022.

Dua jenis umum data adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif. Data kuantitatif merujuk data atau informasi yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Data ini dapat diproses menggunakan

rumus matematika atau menggunakan sistem statistik untuk menganalisisnya. Peneliti mengumpulkan sumber data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, disebut data primer. Jenis data ini digunakan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Praktisi, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja diwawancarai secara daring untuk mendapatkan data utama. Pertanyaan yang diajukan termasuk analisis rasio dan peraturan yang mengaturnya. Selanjutnya informasi ini akan dikumpulkan dan digunakan sebagai informasi lisan tambahan yang akan dianggap relevan selama proses penulisan karya tulis ini. Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara disebut data sekunder. Laporan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah contoh data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai bukti, catatan atau laporan historis yang disimpan dalam arsip atau data dokumenter. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumentasi dan kepustakaan dengan mengumpulkan, mengamati dan menganalisis dokumen tertulis, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (*Audited*).

Data yang digunakan untuk analisis digunakan dalam pendekatan deskriptif komparatif. Beberapa rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio cakupan pembayaran utang (*Debt Service Coverage Ratio*), rasio likuiditas (*current ratio*) dan rasio solvabilitas (*debt to asset ratio*), dihitung berdasarkan data dari APBD.

Hasil dan Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)	Persentase (%)	Pola Hubungan
2018	850.441.774.831,35	1.694.218.759.243,00	50,20%	Partisipatif
2019	826.701.095.332,07	1.742.433.563.849,00	47,45%	Konsultatif
2020	683.432.674.809,81	1.604.813.796.610,00	42,59%	Konsultatif
2021	895.763.128.991,25	1.693.883.879.331,00	52,88%	Partisipatif
2022	1.090.477.839.965,10	1.732.857.804.927,00	62,93%	Partisipatif
Rata-Rata			51,21%	Partisipatif

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis, 2024

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, diketahui jika realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp850.441.774.831,35 atau 33,26% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp826.701.095.332,07 atau 30,68% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi Rp683.432.674.809,81 atau sebesar 28,41% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp895.763.128.991,25 atau 33,07% dari total pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp1.090.477.839.965,10 atau 37,84% dari total pendapatan daerah.

Pada tahun 2018-2022 terjadi kenaikan dan penurunan pada pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.694.218.759.243 atau 66,26% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.742.433.563.849,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp48.214.804.606,00 atau 1,02% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.604.813.796.610,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp137.619.767.239,00 atau 7,90% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.750.322.876.331,00 sehingga mengalami kenaikan senilai Rp92.689.034.721,00 atau 5,59% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.790.988.971.927,00 sehingga kembali mengalami kenaikan senilai Rp40.666.095.595,00 naik 2,32% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 nilai rasio sebesar 50,20%, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 47,45%. Mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 42,59%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 52,88% dan tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 62,93%. Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong dalam pola hubungan partisipatif atau termasuk pada kategori sedang, dimana peran pemerintah pusat semakin berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat kemandirian daerah otonom yang semakin mendekati kemampuan untuk melaksanakan urusan otonomi secara mandiri karena dalam interval antara 50%-75% yaitu 51,21%.

Ketidakmandirian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya mengembangkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Anggaran Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	850.441.774.831,35	789.629.819.565,87	107,70%	Sangat Efektif
2019	826.701.095.332,07	884.562.215.880,37	93,46%	Efektif
2020	683.432.674.809,81	748.055.044.035,47	91,36%	Efektif
2021	895.763.128.991,25	767.219.366.538,00	116,75%	Sangat Efektif
2022	1.090.477.839.965,10	938.568.347.761,00	116,19%	Sangat Efektif
Rata-rata			105,09%	Sangat Efektif

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa anggaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun kecuali pada tahun 2020 ada penurunan anggaran. Pada tahun 2018 PAD dianggarkan sebesar Rp789.629.819.565,87 atau 31,70% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2019 anggaran PAD dinaikkan menjadi sebesar Rp884.562.215.880,37 atau 32,64% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2020 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp748.055.044.035,47 atau 29,27% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2021 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp767.219.366.538,00 atau 29,87% dari total anggaran pendapatan. PAD pada tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp938.568.347.761,00 atau 48,69% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 PAD terealisasi sebesar Rp850.441.774.831,35 atau 107,70% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp826.701.095.332,07 atau 93,46% dari total pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2020 realisasi PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp683.432.674.809,81 atau 91,36% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami kenaikan menjadi Rp895.763.128.991,25 atau 116,75% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2022 realisasi PAD kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.090.477.839.965,10 atau 116,19% dari total pendapatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 107,70%, tahun 2019 sebesar 93,46%, tahun 2020 sebesar 91,36%, tahun 2021 sebesar 116,75%, dan tahun 2022 sebesar 116,19%. Efektivitas PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 105,09%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah

melebihi dari dianggarkan yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun, perlu ada peningkatan dalam sumber PAD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah, karena saat ini masih berada dibawah anggaran yang ditetapkan meskipun secara interval sudah sangat efektif.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 8. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Realisasi Belanja(Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	1.932.426.946.667,40	2.556.977.711.924	75,57%	Efisien
2019	2.264.022.634.746,31	2.694.205.659.655	84,03%	Cukup Efisien
2020	2.203.628.597.880,09	2.405.260.307.098	91,62%	Kurang Efisien
2021	2.115.893.278.614,96	2.708.948.673.048	78,11%	Efisien
2022	1.945.979.205.203,28	2.881.466.811.892	67,53%	Efisien
Rata-rata			79,37%	Efisien

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Belanja Daerah, diketahui pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan belanja daerah sebesar 90,92% dari anggaran Rp2.126.288.918.926,11. Tahun 2019 merealisasikan belanja daerah sebesar 89,73% dari anggaran Rp2.523.039.763.264,99. Tahun 2020 merealisasikan belanja daerah sebesar 93,19% dari anggaran Rp2.364.642.978.202,58. Tahun 2021 merealisasikan belanja daerah sebesar 85,95% dari anggaran Rp2.461.903.318.556,00. Pada tahun 2022 merealisasikan belanja daerah sebesar 78,89% dari anggaran Rp2.466.641.095.689,00.

Rasio efisiensi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 persentase efisiensinya yaitu 90,88%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 89,73%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 93,19%, pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai rasio menjadi 85,95% dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan nilai rasio menjadi 78,89%. Tingginya tingkat realisasi belanja diiringi dengan terlaksananya program kegiatan dengan baik.

Anggaran belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan realisasi belanja dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, sehingga realisasi belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat secara signifikan menjadi 66,75% dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja ini untuk menangani pandemi covid-19 yang terjadi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 2 (dua) prioritas yaitu bidang kesehatan dan bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata rasio efisiensi belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018-2022 sebesar 87,73%. Berdasarkan nilai rata-rata periode tahun 2018-2022, maka kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari rasio efisiensi belanja berada pada kategori cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja yang ditetapkan.

4. Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Operasi

Tabel 9. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2018	1.616.969.356.272,76	1.932.426.946.667,40	83,68%
2019	1.822.821.431.195,45	2.264.022.634.746,31	80,51%
2020	1.741.021.626.249,62	2.203.628.597.880,09	79,01%
2021	1.682.056.492.509,43	2.115.893.278.614,96	79,50%
2022	1.090.477.839.965,10	1.945.979.205.203,28	56,04%

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi diatas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, realisasi belanja operasi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.616.969.356.272,76 atau 83,68% dari total belanja daerah. Pada tahun 2019, realisasi belanja operasi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.822.821.431.195,45 atau 80,51% dari total belanja daerah. Pada tahun 2020, realisasi belanja operasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.741.021.626.249,62 atau 79,01% dari total belanja daerah. Pada tahun 2021, realisasi belanja operasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.682.056.492.509,43 atau 79,50% dari total belanja daerah. Pada tahun 2022, realisasi belanja operasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.090.477.839.965,10 atau 56,04% dari total belanja daerah. Belanja operasi terbesar dari tahun 2018-2022 terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.822.821.431.195,45 atau 80,51% dari total belanja daerah. Belanja operasi terbesar pada tahun 2019 bersumber dari belanja pegawai yang meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Pada rasio belanja operasi, persentase dari tahun 2018-2022 cenderung menurun. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata mencapai 70% sudah cukup baik dalam penyerapan anggaran. Semakin menurun persentase penyerapan anggaran dari tahun 2018-2022 maka semakin turun nilai anggaran dan realisasinya dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dalam tabel diatas bahwa nilai dari realisasi belanja operasi semakin menurun setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik dalam menyerap anggaran yang ditetapkan.

b. Rasio Belanja Modal

Tabel 10. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Belanja daerah	Rasio Belanja Modal
2018	315.397.833.094,64	1.932.426.946.667,40	16,32%
2019	441.201.203.550,86	2.264.022.634.746,31	19,49%
2020	436.502.107.450,47	2.203.628.597.880,09	19,81%
2021	428.654.245.651,53	2.115.893.278.614,96	20,26%
2022	354.008.245.838,87	1.945.979.205.203,28	18,19%

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal, realisasi belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Kenaikan terjadi pada tahun 2019, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, realisasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp315.397.833.094,64 atau 16,32% dari total belanja daerah. Pada tahun 2019, realisasi belanja modal mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp441.201.203.550,86 atau 19,49% dari total belanja daerah. Pada tahun 2020, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi sebesar Rp436.502.107.450,47 atau 19,81% dari total belanja daerah. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi sebesar Rp428.654.245.651,53 atau 20,26% dari total belanja daerah. Pada tahun

2022, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi sebesar Rp354.008.245.838,87 atau 18,19% dari total belanja daerah. Belanja modal terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp441.201.203.550,86 atau 19,49% dari total belanja daerah.

Rasio belanja modal dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Rata-rata persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya hanya 19% dari total anggaran yang ditetapkan. Walaupun persentase penyerapan anggaran dari tahun 2018-2022 terbilang rendah, namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai anggaran dan realisasinya secara rupiah semakin turun dari tahun ke tahun. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan walaupun jika dilihat dari penyerapan anggaran masih kurang baik, tetapi jika dilihat dari jumlah anggaran belanja operasi, belanja modal dan realisasinya semakin tahun justru semakin turun.

Menurut uraian dan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memprioritaskan sebagian dana untuk belanja operasi, sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama disebabkan oleh pengeluaran pegawai yang cukup besar.

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Total Pendapatan (Pn)	Total Pendapatan (Po)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2018	2.556.977.711.924,35	2.251.024.652.420,48	13,59%
2019	2.694.205.659.655,07	2.556.977.711.924,35	5,37%
2020	2.405.260.307.097,81	2.694.205.659.655,07	-10,72%
2021	2.708.948.673.048,25	2.405.260.307.097,81	12,63%
2022	2.881.466.811.892,10	2.708.948.673.048,25	6,37%

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar Rp305.953.059.503,87 atau naik 13,59% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp137.227.947.730,72 atau turun 8,22% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 kembali turun sebesar Rp288.945.352.557,26 atau turun 16,09% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp303.688.365.950,44 atau naik 23,35% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp172.518.138.843,85 atau turun 6,26% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 adalah sebesar 5,45%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong rendah.

6. Debt Service Coverage Ratio

Tabel 12. Perhitungan Debt Service Coverage Ratio

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	850.441.774.831	826.701.095.332	683.432.674.809	895.763.128.991	1.090.477.839.965
Dana Bagi Hasil Pajak	43.368.024.475	53.519.592.074	32.807.368.096	88.238.000.236	78.824.559.772
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	161.046.043.231	162.036.287.529	84.352.916.650	149.202.870.762	417.785.292.654
Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000	1.018.435.174.809	942.308.451.000	939.550.039.000	940.826.194.035
Belanja Wajib	834.688.294.949	696.675.458.111	798.499.351.410	943.695.426.476	861.168.094.263
Pokok Utang	0	0	0	1.938.878.785	20.821.106.123
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Rasio DSCR	1.267.030.169.588	1.364.016.691.632	944.402.059.145	58.232	5.422

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa DSCR pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Tingginya tingkat DSCR disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 melakukan pinjaman kepada PT.SMI dibawah Kementrian Keuangan dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi setelah hantaman Covid-19 sementara kebutuhan pembangunan terutama di sektor kesehatan masih sangat besar.

7. Rasio Likuiditas

Tabel 13. Perhitungan *Current Ratio*

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Rasio Lancar
2018	367.282.600.417,23	223.874.892.226,72	1,641
2019	300.754.174.138,71	144.298.700.380,56	2,084
2020	148.149.499.691,10	118.818.903.636,52	1,247
2021	534.863.663.492,95	207.923.104.514,00	2,572
2022	1.033.768.409.701,41	293.804.095.930,57	3,519
Rata-rata			2,213

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas dilihat tingginya tingkat rasio lancar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perbandingan aktiva lancar dan utang lancar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yaitu 1,641 : 1 yang berarti setiap 1,641 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Pada tahun 2019 perbandingannya meningkat yaitu diangka 2,084 : 1, dimana 2,084 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Pada tahun 2020 perbandingannya menurun yaitu diangka 1,247 : 1, dimana 1,247 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Pada tahun 2021 perbandingannya meningkat yaitu diangka 2,572 : 1, dimana 2,572 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Pada tahun 2022 perbandingannya kembali meningkat yaitu diangka 3,519 : 1, dimana 3,519 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar.

Hasil analisis rasio lancar pada neraca Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2022 dalam keadaan sangat wajar sejalan dengan nilai standar rasio yang dianggap wajar adalah 2:1 dan minimal 1:1 (Mahmudi, 2019). Sehingga hasil nilai analisis rasio lancar tersebut menunjukkan kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat baik dan dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan aset yang dimiliki. Penyebab nilainya lebih dari 1 (satu) karena nilai aset lancarnya lebih besar dibandingkan jumlah utang lancar setiap tahunnya, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

8. Rasio Solvabilitas

Tabel 14. Perhitungan *Debt to Asset Ratio*

Tahun	Total Aset	Total Utang	Persentase
2018	223.874.892.226,72	4.258.912.987.478,37	0,053
2019	144.298.700.380,56	4.456.676.815.376,42	0,032
2020	118.818.903.636,52	4.465.483.911.765,08	0,027
2021	360.808.967.286,00	5.051.728.244.560,45	0,071
2022	431.450.910.767,57	5.732.126.256.593,95	0,075
Rata-rata			22,96

Sumber: Data Primer (Diolah) oleh penulis

Pada tabel diatas menunjukkan rasio solvabilitas mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 menghasilkan nilai rasio 0,053 atau 5,26% yang kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 0,020 atau 2,02%. Kemudian terjadi penurunan lagi tahun 2020 sebesar 0,006 atau

0,58%. Kemudian terjadi kenaikan tahun 2021 sebesar 0,045 atau 7,14%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 0,004 atau 0,38%.

Pada tahun 2018 *Debt to Assets Ratio* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh sebesar 5,26% dengan perbandingan total hutang sebesar Rp 223.874.892.226,72 dengan total aktiva sebesar Rp 4.258.912.987.478,37 artinya bahwa setiap 100% pendanaan perusahaan, sebesar 5,26% dibiayai oleh hutang dan 94,74% berasal dari modal sendiri. Pada tahun 2019 *Debt to Assets Ratio* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh sebesar 5,26% dengan perbandingan total hutang sebesar 144.298.700.380,56 dengan total aktiva sebesar Rp 4.456.676.815.376,42 artinya bahwa setiap 100% pendanaan perusahaan, sebesar 3,24% dibiayai oleh hutang dan 96,76% berasal dari modal sendiri. Pada tahun 2020 *Debt to Assets Ratio* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh sebesar 2,66% dengan perbandingan total hutang sebesar Rp 118.818.903.636,52 dengan total aktiva sebesar Rp 4.465.483.911.765,08 artinya bahwa setiap 100% pendanaan perusahaan, sebesar 7,14% dibiayai oleh hutang dan 92,86% berasal dari modal sendiri. Pada tahun 2021 *Debt to Assets Ratio* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh sebesar 2,66% dengan perbandingan total hutang sebesar Rp 360.808.967.286,00 dengan total aktiva sebesar Rp 5.051.728.244.560,45 artinya bahwa setiap 100% pendanaan perusahaan, sebesar 7,14% dibiayai oleh hutang dan 92,86% berasal dari modal sendiri. Pada tahun 2022 *Debt to Assets Ratio* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh sebesar 2,66% dengan perbandingan total hutang sebesar Rp 431.450.910.767,57 dengan total aktiva sebesar Rp 5.732.126.256.593,95 artinya bahwa setiap 100% pendanaan perusahaan, sebesar 7,53% dibiayai oleh hutang dan 92,47% berasal dari modal sendiri. Rendahnya tingkat rasio solvabilitas menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah mudah dalam memperoleh pinjaman.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dari rasio keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sedang dan pola hubungannya tergolong partisipatif dengan rata-rata 51,21%, dimana peran pemerintah pusat semakin berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat kemandirian daerah otonom yang semakin mendekati kemampuan untuk melaksanakan urusan otonomi secara mandiri.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efektif dengan rata-rata 105,09%. Hal ini ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direncanakan.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dikategorikan efisien dengan rata-rata 79,37%. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerap anggaran dengan baik.
4. Jika dilihat dari rasio keserasian belanja selama tahun anggaran 2018-2022 memperlihatkan bahwa rata-rata alokasi belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Rasio keserasian belanja pemerintah daerah menunjukkan focus yang lebih besar pada belanja operasi, yang berarti bahwa belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung relatif kecil.
5. Jika dilihat dari rasio pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018-2022 sebesar 5,45% dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat setiap tahunnya.
6. Jika dilihat dari *debt service coverage ratio* dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2022 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya diatas 2,5%.
7. Jika dilihat dari rasio likuiditas (*current ratio*) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

8. Belitung pada tahun 2018-2022, kinerjanya dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan oleh nilai rata-rata *current ratio* selama lima tahun berturut-turut yang telah mencapai tingkat rasio lebih dari 1.
9. Jika dilihat dari rasio solvabilitas (*debt to asset ratio*) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2022 dapat dikatakan sudah baik, hal ini dikarenakan karena berdasarkan hasil perhitungannya berada di bawah angka 1 (satu). Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur dari *Debt to Asset Ratio* dapat dikatakan sudah baik karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menutup hutangnya melalui aktivanya sendiri dengan cukup baik.

Referensi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. (Depok: RajaGrafindo Persada)
- Amal, M. Ichlasul dan Puji Wibowo. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*, Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah. 4(1)
- Ariadi, Wa. 2021. *Manajemen Daerah dalam Konsep dan Analisis* (Yogyakarta: Deepublish)
- Dailibas, dkk. 2010. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. (Yogyakarta: CV Absolute Media)
- Fitra, Halkadri. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. (Malang: CV IRDH)
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik* (Yogyakarta: Deepublish)
- Konstanse, Kamilaus. 2023. *Otonomi dan Kinerja Pemerintah Daerah*. (Jawa Barat: PT. Pusat Literasi Dunia)
- Muller, Ralf. 2017. *Governance and Governmentality for Projects Enablers, Practices, and Consequences*. (New York: Routledge)
- Sopannah, Ana dkk. 2020. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. (Surabaya: Sropindo Media Pustaka)
- Yamin, M. 2022. *Monograf Relasi Kuasa Eksekutif-Legislatif dalam Pembahasan APBD*. (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management)